

Pengaruh Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Dan Surplus/Defisit Laporan Keuangan Pada Ketahanan Fiskal Pemerintah Studi Kasus Kota/Kabupaten di Indonesia Tahun 2016-2018

*Determinant of
District Fiscal
Resilience*

141

I Gede Sudi Adnyana, Cynthia Febrianti, Firdaus Amyar
Program Studi Akuntansi, Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan
Email: cynthia.febrianti@ibik.ac.id

Submitted:
JANUARI 2022

Accepted:
APRIL 2022

ABSTRACT

Fiscal autonomy or fiscal decentralization is a local government can manage the finances of regions whose financial resources become the authority of the local government. To maintain fiscal sustainability there are several preventive measures that can be taken to minimize risks and maximize the productivity of the State Budget. The purpose of this study is to find out whether regional revenues, regional expenditures and surplus/deficit of financial statements affect the fiscal resilience of districts and cities in Indonesia in 2016-2018. The sample from this study is secondary data obtained from the Financial Examiner's Board by sampling method of Probability Sampling and Stratified Random Sampling. The study was tested using EVIEWS. It found that regional spending and surplus/deficit financial statements had a significant influence on regional fiscal resilience, while regional revenues did not affect significantly.

Keywords: Revenue, Expenditure, Surplus/Deficit, Fiscal Resilience

ABSTRAK

Otonomi fiskal atau desentralisasi fiskal yakni pemerintah daerah dapat mengelola keuangan daerah yang sumber keuangannya menjadi kewenangan pemerintah daerah tersebut. Untuk menjaga kesinambungan fiskal terdapat beberapa langkah preventif yang dapat dilakukan untuk meminimalisasi risiko dan memaksimalkan produktivitas APBN. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pendapatan daerah, belanja daerah dan surplus/defisit laporan keuangan berpengaruh terhadap ketahanan fiskal kabupaten dan kota di Indonesia Tahun 2016-2018. Sampel dari penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan dengan metode pemilihan sampel *Probability Sampling* dan *Stratified Random Sampling*. Penelitian ini diuji menggunakan EVIEWS. Ditemukan hasil bahwa belanja daerah dan surplus/defisit laporan keuangan mempunyai pengaruh signifikan terhadap ketahanan fiskal daerah, sedangkan pendapatan daerah tidak mempengaruhi secara signifikan.

Kata Kunci : Pendapatan, Belanja, Surplus/Defisit, Ketahanan Fiskal

PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional berarti suatu proses pembangunan pada aspek ekonomi, aspek sosial, dan sikap masyarakat di suatu negara. Pembangunan mencerminkan perubahan masyarakat atau penyesuaian ke kondisi kehidupan yang lebih baik. Pembangunan ekonomi di Indonesia bertujuan untuk mensejahterakan rakyat, bangsa, dan negara secara merata sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Untuk mengukur apakah pembangunan ekonomi di suatu negara berjalan dengan baik dapat dilihat dari pendapatan nasional yang tinggi, produk nasional bruto (PNB) yang tinggi, Kesempatan kerja bagi masyarakat terbuka lebar, perekonomian yang stabil, dan neraca pembayaran luar negeri tidak defisit. Pembangunan nasional dilaksanakan oleh rakyat dan kembali kepada rakyat untuk pelaksanaan pembangunan ekonomi secara konsekuen.

JIAKES

Jurnal Ilmiah Akuntansi
Kesatuan
Vol. 10 No. 1, 2022
pg. 141 – 152
IBI Kesatuan
ISSN 2337 – 7852
E-ISSN 2721 – 3048
DOI: 10.37641/jiakes.v10i1.1266

Pembangunan ekonomi merupakan usaha menghasilkan serta mempertahankannya peningkatan produk nasional bruto ataupun GNP (*Gross National Product*) sesuatu Negeri. Indeks ekonomi lain yang sering digunakan buat mengukur tingkatan kemajuan pembangunan ekonomi merupakan tingkatan kemajuan pembangunan ekonomi merupakan tingkatan perkembangan pemasukan per kapita (*Income Per Capita*) ataupun GNP per kapita. (Michael P. Todaro,).

Ketahanan fiskal yang keberlanjutan (*fiscal sustainability*) adalah kondisi dimana pemerintah mampu menjalankan kebijakan fiskal yang dapat menstabilkan perekonomian negara melalui fungsi distribusi, alokasi, dan stabilisasi keuangan jangka panjang (Hariyanto, 2019). Untuk menunjang ketahanan fiskal yang berkelanjutan terdapat tiga faktor. Pertama yaitu, penerimaan negara yang optimal. Pendapatan nasional adalah penerimaan negara dalam satu periode tahun berjalan yang diterima dari masyarakat ataupun milik faktor produksi. Dari pengertian tersebut, pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan negara dengan memajukan sektor industri yang mengelola terlebih dahulu bahan baku yang berlimpah di Indonesia. Pemerintah juga melakukan peningkatan dalam penerimaan pajak dengan cara memperkuat institusi pajak, kepatuhan wajib pajak, memperluas basis pajak (*tax ratio*), serta mencegah kebocoran.

Tabel 1.1 Pendapatan Daerah

No	Komponen	Nasional		Provinsi		Kab/Kota	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
	Total Pendapatan	1.095,0 T	100,0%	331,4 T	100,0%	763,5 T	100,0%
1	PAD	269,9 T	24,6%	151,7 T	45,8%	118,2 T	15,5%
2	DAPER	666,7 T	60,9%	156,4 T	47,2%	510,2 T	66,8%
3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	158,4 T	14,5%	23,3 T	7,0%	135,1 T	17,7%

Sumber : DJPK Kemenkeu RI

Kedua adalah belanja pemerintah yang berkualitas. Belanja adalah pengurang nilai kekayaan bersih yang berupa kewajiban dalam satu periode tahun berjalan. Pengeluaran pemerintah memiliki peran penting karena dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Belanja pemerintah disalurkan untuk belanja peningkatan produktivitas masyarakat, sehingga masyarakat dapat memiliki daya beli yang lebih baik dan pada pembangunan infrastruktur. Ketiga adalah pengelolaan pembiayaan yang berkelanjutan, yang berarti bahwa penggunaan utang dapat dilakukan tanpa terhambat oleh beban utang masa lalu. Utang Pemerintah dapat berdampak positif untuk dialokasikan sebagai pembiayaan produktif seperti pembiayaan infrastruktur (Hariyanto, 2019).

Tabel 2 Belanja Daerah

Ur aia n		Kabupaten/Kota			
		2017		2018	
		Rp	%	Rp	%
	Total Belanja	769,6 T	100,0%	804,2 T	100,0%
1	Belanja Pegawai	318,0 T	41,3%	320,0 T	39,8%
2	Belanja Barang dan Jasa	165,5 T	21,5%	191,8 T	23,8%
3	Belanja Modal	166,3 T	21,6%	164,2 T	20,4%
4	Belanja Lainnya	119,8 T	15,6%	128,2 T	15,9%

Sumber : DJPK Kemenkeu RI

Surplus/Defisit Laporan keuangan pun menjadi salah satu faktor dalam ketahanan fiskal. Defisit terjadi apabila terdapat ketidaksesuaian antara pendapatan dan belanja, dimana jumlah belanja melebihi jumlah pendapatan. Defisit yang hanya terjadi selama satu tahun dapat bersifat sementara, sedangkan defisit yang terjadi selama tiga tahun berturut-turut menunjukkan terdapat ketidakseimbangan fiskal (Suriadi, 2013). Rasio utang menjadi faktor utama yang dapat menjadi *early warning* dan sebagai salah satu indikator kesinambungan fiskal di Indonesia. Salah satunya, jika rasio utang Indonesia mengalami peningkatan cukup drastis, terdapat indikasi bahwa kondisi fiskal di

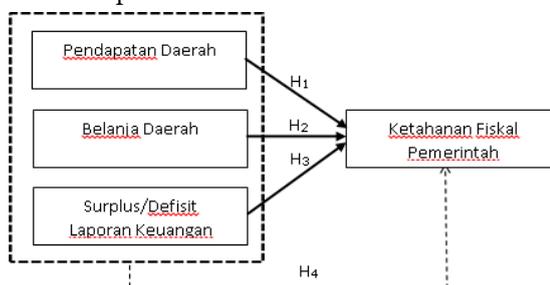
Indonesia tidak mengalami kesinambungan (Muhammad Basorudin,2019).

Untuk menjaga kesinambungan fiskal terdapat beberapa langkahpreventif yang dapat dilakukan untuk meminimalisasi risiko dan memaksimalkan produktivitas APBN, antara lain dengan mengendalikan defisit dalam batas aman, mendorong produktivitas peningkatan tax ratio selaras dengan kapasitas perekonomian, mendorong penguatan belanja modal, serta pengembangan skema pembiayaan kreatif (jurnal *Strategies to Maintain Long Term Fiscal Sustainability*,2019).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan kesenjangan kemandirian fiskal antar daerah di Indonesia sangat tinggi. Pada IHPS I Tahun2020, Rabu (11/11), Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) di DKI Jakarta sebesar 0,7107. IKF DKI Jakarta menjadi yang tertinggi. Sementara, IKF di Papua Barat hanya 0,0427. Ini menjadi IKF yang terendah di Indonesia. Kesenjangan kemandirian fiskal bukan hanya terjadi di provinsi, tapi juga kota/kabupaten (www.cnnindonesia.com ,2020).

Di Indonesia terdiri dari 415 Kabupaten dan 93 kota dalam 34Provinsi. Dimana sistem yang berlaku di daerah satu dan daerah lainnya tidakrelevan dijalankan di semua daerah secara serempak. Pemerintah dalam PPNo 38 Tahun 2007 menyebutkan bahwa adanya pengalihan tugas dan wewenang bagi pemerintah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang disebut otonomi daerah. Dengan adanya Otonomi Daerah ini daerah berkesempatan untuk memaksimalkan fungsi pelayanan dan pembangunan di daerah untuk sejajar dengan daerah lain sesuai dengan kewenangan yang diaturnya. Otonomi fiskal atau desentralisasi fiskal yakni pemerintah daerah dapat mengelola keuangan daerah yang sumber keuangannya menjadi kewenangan pemerintah daerah tersebut.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuanyang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : Untuk mengetahui apakah pendapatan daerah, belanja daerah dan surplus/defisit laporan keuangan berpengaruh signifikan secara parsial dan simultan terhadap ketahanan fiskal kabupaten dan kota di Indonesia Tahun 2016-2018.



Keterangan:

- > Pengaruh Secara Parsial
- - - - -> Pengaruh Secara Simultan

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Teoritis

Pengembangan Hipotesis Penelitian

Peningkatan penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan pemerintah, baik dengan cara intensifikasi maupun ekstensifikasi. Karena ketahanan fiskal terancam dalam jangka panjang, maka peningkatan pajak sebaiknya berasal dari pajak barang konsumtif. Untuk itu perlu adanya peningkatan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter dengan menyelaraskan tujuan kebijakan untuk stabilisasi sektor moneter (Tahwin, 2008). Dalam Penurunan penerimaan pajak dan peningkatan pengeluaran pemerintah telah mengakibatkan penurunan kemandirian fiskal, baik dari ukuran rasio pajak belanja non utang maupun ukuran rasio pajak-belanja total. Kedua variabel yang mencerminkan kemampuan keuangan negara dalam membiayai pengeluaran tersebut terus menerus mengalami penurunan dalam kurun waktu 2015-2025. Oleh karena itu untuk menjaga tax finance perlu dilakukan kebijakan peningkatan produktivitas alokasi pengeluaran pemerintah (Jaka Sriyana, 2011). H1 : Pendapatan daerah berpengaruh positif signifikan

terhadap tingkat ketahanan fiskal

Pengaruh Belanja Daerah dengan Ketahanan Fiskal Pemerintah

Perlu dilakukannya penguatan kualitas belanja agar lebih efisien dan produktif melalui peningkatan belanja modal dan efisiensi belanja melalui *flat policy* dan efisiensi subsidi serta mengendalikan *mandatory spending*, baik dari sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan (*Strategies to Maintain Long Term Fiscal Sustainability, 2019*). Belanja negara untuk ekspansi relative tergerus akibat dari tingginya *mandatory spending*. Kondisi ini menyebabkan *primary balance* sulit menuju positif, defisit APBN dan rasio utang terus meningkat sehingga dapat mengancam kesinambungan fiskal di jangka panjang (*Long Term Fiscal Sustainability, 2019*). Dari uraian diatas dapat ditarik asumsi awal bahwa belanja daerah berpengaruh positif terhadap ketahanan fiskal pemerintah, yaitu semakin besar belanja daerah maka kemungkinan adanya ketahanan fiskal pemerintah akan semakin besar. H2 : Belanja daerah berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat ketahanan fiskal

Pengaruh Surplus/Defisit Laporan Keuangan dengan Ketahanan Fiskal Pemerintah

Pengendalian defisit dan rasio utang dalam batas aman dan diupayakan menurun secara bertahap sesuai kebutuhan pendanaan pembangunan dan mempertimbangkan keseimbangan makro ekonomi (*Strategies to Maintain Long Term Fiscal Sustainability, 2019*). Defisit anggaran menjadi penyebab utama terganggunya kesinambungan fiskal (Wardhono, 2012). Kesinambungan fiskal dikatakan baik jika nilai rasio utang terhadap PDB dari tahun ke tahun bersifat stabil, dimana nilai defisit anggaran selalu sebanding dengan PDB yang ditopang (Waryanto, 2015). Dari uraian diatas dapat ditarik asumsi awal bahwa surplus/defisit Laporan Keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap ketahanan fiskal pemerintah, yaitu semakin besar surplus/defisit laporan keuangan maka kemungkinan terganggunya ketahanan fiskal pemerintah akan semakin besar. H3 : Defisit Laporan Keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat ketahanan fiskal

Pengaruh Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Defisit Laporan Keuangan terhadap Ketahanan Fiskal Pemerintah Dengan adanya penerimaan negara yang optimal, belanja pemerintah yang berkualitas, serta pengelolaan pembiayaan yang berkelanjutan maka dapat terciptanya ketahanan fiskal yang baik (Eri Hariyanto, 2019). Ketidakberdayaan atau ketidakmampuan fiskal dalam memainkan perannya secara optimal tersebut dapat dipicu oleh penurunan yang signifikan terhadap pendapatan negara dan/atau adanya peningkatan beban belanja negara yang sulit dikendalikan sehingga berdampak pada melebarnya defisit anggaran melebihi batas aman, apalagi diperparah dengan tidak tersedianya *fiscal buffer*. (*Strategies to Maintain Long Term Fiscal Sustainability, 2019*). H4 : Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Defisit Laporan Keuangan berpengaruh simultan terhadap tingkat ketahanan fiskal

METODE PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka penelitian ini tergolong penelitian kuantitatif, Penelitian kuantitatif adalah cara peneliti memproses data-data yang berbentuk angka sebagai perlengkapan penelitian dan pelaksanaan kajian, Kasiram (2008:149). Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kota/Kabupaten di Indonesia tahun 2016-2018. Pemilihan kota/kabupaten dipilih secara acak untuk mewakili provinsinya. Objek Penelitian ini menguji hubungan antara variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Penelitian ini berusaha menjelaskan pengaruh Pendapatan Daerah (X1), Belanja Daerah (X2) dan Surplus/Defisit Laporan Keuangan (X3) sebagai variabel independen dalam memprediksi Ketahanan Fiskal (Y) pada Pemerintahan Daerah Tahun 2016-2018 sebagai variabel dependen.

Populasi dari penelitian ini adalah Kota dan Kabupaten di Indonesia yang meneliti pendapatan daerah, belanja daerah, dan surplus/defisit laporan keuangan dengan metode pemilihan sampel *Probability Sampling* yaitu teknik pengambilan sample dimana semua elemen mempunyai peluang untuk terpilih menjadi sample. *Stratified Random Sampling*

dilakukan dengan cara membagi populasi yang ada menjadi beberapa kelompok sesuai Provinsinya masing masing dan setelah itu kota/kabupaten akan dipilih dari tiap-tiap Provinsi secara random atau acak. Terdapat 514 kota dan kabupaten yang akan di uji terlebih dahulu apakah lolos untuk di analisis dalam penelitian ini.

Sumber data penelitian diambil dari Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan untuk Kota dan Kabupaten di Indonesia tahun 2016-2018. Yang berari menggunakan metode pengumpulan dataset statistik. Data penelitian ini dianalisis menggunakan regresi berganda dengan bantuan software EViews.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini meliputi Ketahanan Fiskal kota dan kabupaten di Indonesia pada tahun 2016 sampai 2018. Data penelitian ini berupa data sekunder yang bersumber laporan keuangan dan laporan Operasional kota dan kabupaten. Penelitian ini menggunakan 3 tahun periode pengamatan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan *purpose sampling* dengan beberapa kriteria tersebut dari 514 Kota dan kabupaten hanya 65 kota dan kabupaten yang akandijadikan sampel karena telah memenuhi beberapa kriteria dalam *purpose sampling*. Pada penelitian ini pula menggunakan *Stratified Random Sampling* dilakukan dengan cara membagi populasi yang ada menjadi beberapa kelompok sesuai Provinsinya masing masing dan setelah itu kota/kabupaten akan dipilih dari tiap-tiap Provinsi secara random atau acak.

Tabel 1 *Purpose Sampling* Data Penelitian

No	Keterangan	Tidak Memenuhi Kriteria	Memenuhi Kriteria
1.	Povinsi di Indonesia	-	34
2.	Menerbitkan laporan keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 s.d 31 Desember 2018	-	514
3.	Memiliki data lengkap sesuai dengan variabel yang digunakan dalam penelitian	-	514
4.	Pemilihan Kota dan Kabupaten secara acak	449	65
	Jumlah kota dan kabupaten		65
	Tahun pengamatan		3
	Jumlah sampel penelitian = 65 x 3		195

Berdasarkan seleksi sampel yang telah dilakukan maka berikut ini daftar nama perusahaan yang menjadi sampel dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2 Daftar Sampel Kota dan Kabupaten

No	Provinsi	Pemda	Tipe Pemda
1	Aceh	Banda Aceh	Kota
2		Aceh Jaya	Kab
3	Sumatera Utara	Medan	Kota
4		Karo	Kab
5	Sumatera Barat	Padang	Kota
6		Agam	Kab
7	Riau	Pekanbaru	Kota
8		Indragiri Hilir	Kab
9	Jambi	Jambi	Kota
10	Sumatera Selatan	Palembang	Kota
11		Ogan Hilir	Kab
12	Bengkulu	Bengkulu	Kota
13		Kepahiang	Kab
14	Lampung	Bandar Lampung	Kota
15		Pesisir Barat	Kab
16	Kepulauan Bangka Belitung	Pangkalpinang	Kota
17		Belitung	Kab
18	Kepulauan Riau	Tanjung Pinang	Kota
19		Bintan	Kab

20	Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Jakarta	Kota
21	Jawa Barat	Bandung	Kota
22		Sukabumi	Kab
23	Jawa Tengah	Semarang	Kota
24		Seragen	Kab
25	Daerah Istimewa Yogyakarta	Yogyakarta	Kota
26		Gunung Kidul	Kab
27	Jawa Timur	Surabaya	Kota
28		Malang	Kab
29	Banten	Serang	Kota
30		Tangerang	Kab
31	Bali	Denpasar	Kota
32		Gianyar	Kab
33	Nusa Tenggara Barat	Mataram	Kota
34		Sumbawa	Kab
35	Nusa Tenggara Timur	Kupang	Kota
36		Manggarai	Kab
37	Kalimatan Barat	Pontianak	Kota
38		Ketapang	Kab
39	Kalimantan Tengah	Palangka Raya	Kota
40		Katingan	Kab
41	Kalimantan Selatan	Banjarmasin	Kota
42		Banjar	Kab
43	Kalimantan Timur	Samarinda	Kota
44		Kutai Barat	Kab
45	Kalimantan Utara	Bulungan	Kab
46		Malinau	Kab
47	Sulawesi Utara	Manado	Kota
48		Minahasa	Kab
49	Sulawesi Tengah	Palu	Kota
50		Poso	Kab
51	Sulawesi Selatan	Makasar	Kota
52		Gowa	Kab
53	Sulawesi Tenggara	Kendari	Kota
54		Buton	Kab
55	Gorontalo	Gorontalo	Kota
56		Pohuwato	Kab
57	Sulawesi Barat	Mamuju	Kab
58	Maluku	Ambon	Kota
59		Buru	Kab
60	Maluku Utara	Ternate	Kota
61		Halmahera Barat	Kab
62	Papua	Jayapura	Kota
63		Merauke	Kab
64	Papua Barat	Manokwari	Kab
65		Sorong	Kota

Hasil Analisis Data Penelitian

Tabel 3 Statistik Deskriptif

	Y_KF	X1_PD	X2_BD	X3_SDLK
Mean	33.99	28,15	28,04	25,77
Median	19.12	27,99	27,92	25,86
Maximum	424.98	32,01	31,65	31,12
Minimum	2.96	27,25	26,83	20,64
Std. Dev.	49.97	71.57	69.28	133.37
Sum	531,02	186,97	183,72	236,76
Observations	195	195	195	195

Sumber : Data Sekunder Diolah

Dari hasil pengolahan EVIEWS dapat diketahui hasil dari statistika deskriptif atas seluruh variabel, sebagai berikut :

Ketahanan Fiskal(Y). Pada data ketahanan fiskal terdapat 195 data valid, tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai dari ketahanan fiskal adaah 2,96 sampai 424,98 dengan

nilai rata rata 33,99 dan standar deviasi sebesar 49,97. Ketahanan Fiskal menggambarkan kemampuan pemerintah untuk menjaga keuangan publik pada posisi yang kredibel dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Nilai minimum ketahanan fiskal di peroleh dari Halmahera Barat tahun 2016, dan nilai maksimum oleh Jakarta Tahun 2017 karena adanya perubahan APBN pada tahu tersebut sebesar 2,48 %.

Pedapatan Daerah (X1). Pada data pendapatan daerah terdapat 195 data valid, tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai dari pendapatan daerah adaah 27,25 sampai 32,01 dengan nilai rata rata 28,15 dan standar deviasi sebesar 71.57. Pendapatan daerah adalah hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Nilai minimum Pendapatan daerah di peroleh dari Halmahera Barat tahun 2017, dan nilai maksimum oleh Jakarta Tahun 2017 karena adanya perubahan APBN pada tahu tersebut sebesar 2,48 %.

Belanja Daerah (X2). Pada data belanja daerah terdapat 195 data valid, tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai dari belanja daerah adaah 26,83 sampai 31,65 dengan nilai rata rata 28,03 dan standar deviasi sebesar 69.28. Belanja sendiri di definisikan sebagai semua pengeluaran dari rekeningkas umum Negara/ daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Nilai minimum profitabilitas di peroleh dari Pesisir Barat tahun 2016, dan nilai maksimum oleh Jakarta Tahun2018 karena belanja menstimulus adanya pertumbuhan ekonomi di Jakarta saat ini lebih berkualitas dengan dibuktikan menurunnya kemiskinan di DKI.

Surplus/Defisit Laporan Keuangan (X3). Pada data surplus/defisit laporan keuangan terdapat 195 data valid, tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai dari surplus/defisit laporan keuangan adaah 20,64 sampai 31,12 dengan nilai rata rata 25,77 dan standar deviasi sebesar 133.37. Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa. Nilai minimum profitabilitas diperoleh dari Gorontalo tahun 2018 dan nilai maksimum oleh Jakarta Tahun 2017 karena adanya perubahan APBN pada tahun tersebut sebesar 2,48%.

Penentuan Model Regresi

Tabel Hasil Uji Chou

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	14.399529	(64,127)	0.0000
Cross-section Chi-square	411.644095	64	0.0000

Sumber : EVIEWS

Uji Chow dilakukan penulis untuk memilih *Common effect* atau *Fixed Effect* yang dimana nilai probabilitas *Cross Section Chi Square* 0,00 dibawah 0,05 sehingga H_0 yaitu *Fixed Effect*.

Tabel Hasil Uji Husman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	1.305666	3	0.7278

Hasil : REM (tidak konsisten dengan Uji Chou lanjut Uji LM)

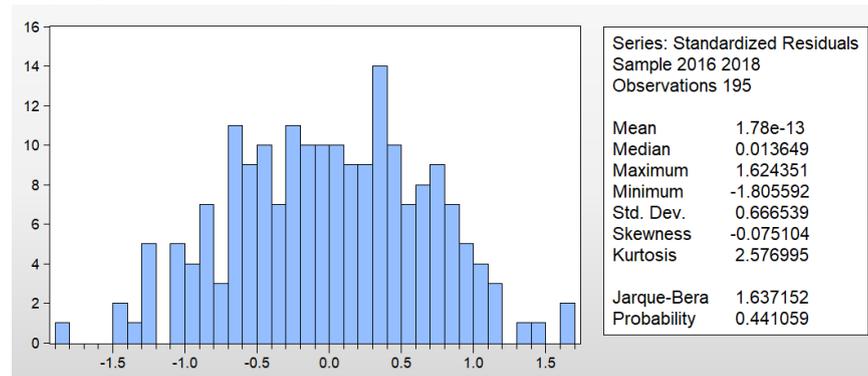
Uji Husman dilakukan untuk membandingkan hasil terbaik antara *Fixxed Effect* dan *Random Effect*, dimana hasil Uji Hausman nilai Probability 0,7278 dimana lebih besar dari 0,00 sehingga H_0 tidak dapat ditolak (*RandomEffect*).

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah model *Random Effect* lebihbaik daripada metode *Common Effect* (OLS). Hasil pobabilitas cross sectionchi square sebesar 0,00 dimana lebih kecil dari 0,05 (*Random Effect*).

Tabel Hasil Uji Lagrange Multiplier
Lagrange Multiplier Tests for Random Effects
Null hypotheses: No effects
Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	129.0937 (0.0000)	0.632614 (0.4264)	129.7264 (0.0000)

Hasil : Gunakan REM
Tabel Gambar Normalitas Data



Sumber : EViews

Nilai probabilitas uji Jarque-Bera sebesar $(0,00) < \text{nilai signifikansi } (\alpha = 0,05)$ maka dapat disimpulkan bahwa data tidak terdistribusi normal. Untuk itu maka dilakukan transformasi data dengan cara mengubah data menjadi log di dalam aplikasi Eviews. Hasilnya dapat dilihat bahwa nilai probabilitas uji Jarque-Bera sebesar $(0,44) > \text{nilai signifikansi } (\alpha = 0,05)$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 tidak dapat ditolak atau data terdistribusi normal.

Tabel Hasil Uji Multikolinearitas

	X1_PD	X2_BD	X3_SDLK
X1_PD	1	0.981020054793947	0.6160795094627422
X2_BD	0.981020054793947	1	0.5399183907593846
X3_SDLK	0.6160795094627422	0.5399183907593846	1

Sumber : EViews

Dapat dilihat pada variabel Pendapatan daerah dan belanja daerah terdapat masalah multikolinearitas karena nilai hasil uji correlation sebesar 0,981 (98,1%) diatas 0,80 (80%).

Tabel Hasil Uji Autokorelasi

R-squared	0.324129	Mean dependent var	0.775296
Adjusted R-squared	0.313513	S.D. dependent var	0.343660
S.E. of regression	0.284738	Sum squared resid	15.48547
F-statistic	30.53275	Durbin-Watson stat	1.927207
Prob(F-statistic)	0.000000		

Nilai Durbin Watson sebesar 1,9272. $N = 195$, $K = 3$. Maka nilai $dL = 1,7345$, $dU = 1,7969$, $4-dL = 2,2655$ dan $4-dU = 2,2031$. Nilai DW sebesar 1,9272 berada diantara nilai $dU = 1,7969$ dan $4 - dU = 2,2031$ maka dapat disimpulkan tidak terdapat masalah autokorelasi setelah melakukan transformasi data menjadi log.

Model Regresi yang Digunakan (REM)

Dependent Variable: LOG(Y_KF)
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 07/02/21 Time: 14:28
Sample: 2016 2018
Periods included: 3
Cross-sections included: 65
Total panel (balanced) observations: 195
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-215.9303	24.29199	-8.888950	0.0000
LOG(X1_PD)	-4.989665	6.973559	-0.715512	0.4752
LOG(X2_BD)	31.01039	6.638149	4.671543	0.0000
LOG(X3_SDLK)	1.578117	0.699617	2.255689	0.0252
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.618157	0.8237
Idiosyncratic random			0.286009	0.1763
Weighted Statistics				
R-squared	0.324129		Mean dependent var	0.775296
Adjusted R-squared	0.313513		S.D. dependent var	0.343660
S.E. of regression	0.284738		Sum squared resid	15.48547
F-statistic	30.53275		Durbin-Watson stat	1.927207
Prob(F-statistic)	0.000000			

Koefisien Pendapatan Daerah sebesar -4,989, maka dapat diartikan jika pendapatan daerah naik 1 satuan maka ketahanan fiskal akan turun sebesar 4,989 dengan asumsi variabel lain tetap. Koefisien Belanja Daerah sebesar 31,01, maka dapat diartikan jika pendapatan daerah naik 1 satuan maka ketahanan fiskal akan meningkat sebesar 31,01 dengan asumsi variabel lain tetap. Koefisien Surplus/Defisit Laporan Keuangan sebesar 1,578, maka dapat diartikan jika surplus/defisit laporan keuangan naik 1 satuan maka ketahanan fiskal akan meningkat sebesar 1,578 dengan asumsi variabel lain tetap.

Kemudian dilakukan Uji statistik t yang pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018, 98). Hasil Uji Statistik T adalah sebagai berikut:

1. Variabel Pendapatan Daerah ini berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap ketahanan fiskal karena Pendapatan daerah memiliki nilai koefisiennya -4,98 dan nilai prob 0,47 lebih besar dari nilai signifikansi 0,05, Artinya ketika variabel pendapat daerah naik sebesar 1 satuan maka variabel ketahanan fiskal akan turun sebesar 4.98.
2. Variabel Belanja Daerah ini mempengaruhi signifikan positif terhadap ketahanan fiskal karena Belanja daerah memiliki nilai koefisiennya 31,01 dan nilai prob 0,00 lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05, Artinya ketika variabel belanja daerah naik sebesar 1 satuan maka variabel ketahanan fiskal akan naik sebesar 31,01.
3. Variabel Surplus/Defisit Laporan Keuangan ini mempengaruhi signifikan positif terhadap ketahanan fiskal karena Surplus/defisit lapkeu memiliki nilai koefisiennya 1,57 dan nilai prob 0,02 lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05, Artinya ketika variabel belanja daerah naik sebesar 1 satuan maka variabel ketahanan fiskal akan naik sebesar 1,57.

Uji F dilakukan untuk menguji pengaruh variabel independen (independensi, obyektivitas, pengetahuan, pengalaman kerja, integritas auditor) secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen (kualitas hasil audit internal). Uji F atau ANOVA dilakukan dengan membandingkan tingkat signifikansi yang ditetapkan untuk penelitian dengan probability value dari hasil penelitian (Ghozali, 2020). Kriteria dalam pengujian ini adalah jika probability value < 0,05, maka H_0 diterima dan jika probability value > 0,05 maka H_0 ditolak. Hasil Uji F menunjukkan Nilai Probability (F Statistic) sebesar 0,000, maka dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel bebas mempengaruhi secara simultan terhadap ketahanan fiskal.

Ketepatan Perkiraan Model (*Goodness of Fit*) atau Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Tingkat ketepatan regresi dinyatakan dalam koefisien (R^2) yang nilainya antara 0 – 1. Jika R^2 menunjukkan variabel independen bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Jika dalam suatu model terdapat lebih dari dua variabel independen, maka lebih baik menggunakan nilai adjusted

R² (Ghozali, 2020).

Hasil Uji R² menunjukkan Nilai Adjusted R² sebesar 0,3135, maka dapat diartikan bahwa ketiga variabel bebas dapat menjelaskan Ketahanan Fiskal sebesar 31,35% sedangkan sisanya 68,65% dijelaskan oleh faktor lain.

Pembahasan

Pengaruh Pendapatan daerah terhadap Ketahanan Fiskal. Hasil Penelitian berdasarkan Uji Statistik T yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Daerah ini berpengaruh negatif tidaksignifikan terhadap ketahanan fiskal karena nilai Prob. (0,4752) > nilai signifikansi ($\alpha = 0,05$). Pada akuntansi pemerintah/publik, pendapatan dialokasikan langsung terhadap belanja. Ketahanan fiskal yang berasal dari belanja secara tidak langsung mengandalkan *rely on* pendapatan. Hal ini mendukung penelitian Muhammad Tahwin, 2008 tentang pendapatan pajak yang berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap ketahanan fiskal.

Pengaruh Belanja Daerah terhadap Ketahanan Fiskal. Hasil Penelitian berdasarkan Uji Statistik T yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa variabel Belanja Daerah ini mempengaruhi signifikan positif terhadap ketahanan fiskal karena nilai Prob. (0,000) < nilai Signifikansi ($\alpha = 0,05$). Belanja yang tinggi atau besar mempengaruhi signifikan ketahanan fiskal, hal ini mendukung penelitian Agustina Endah Wahyuningtyas, 2010 tentang Pengeluaran pemerintah berpengaruh positif secara statistik menunjukkan bahwa kebijakan fiskal ekspansif justru menimbulkan fenomena crowding out pada investasi.

Pengaruh Surplus/Defisit Laporan Keuangan terhadap Ketahanan Fiskal. Hasil Penelitian berdasarkan Uji Statistik T yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa variabel Surplus/Defisit Laporan Keuangan ini mempengaruhi signifikan positif terhadap ketahanan fiskal karena nilai Prob. (0,0252) < nilai signifikansi ($\alpha = 0,05$). Hal ini mendukung penelitian La Ode Suriadi, 2013 tentang Dengan menggunakan utang Negara untuk pembiayaan defisit anggaran pemerintah, masih dapat mempertahankan *fiscal sustainability*.

PENUTUP

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan daerah, belanja daerah, dan surplus/defisit laporan keuangan terhadap ketahanan fiskal pemerintah daerah kota dan kabupaten periode 2016-2018. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji asumsi klasik (Normalitas, multikolinearitas, dan autokorelasi) kemudian dilakukan analisis regresi berganda untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pengaruh antara pengaruh pendapatan daerah, belanja daerah, dan surplus/defisit laporan keuangan terhadap ketahanan fiskal pemerintah daerah kota dan kabupaten.

Hasil penelitian berdasarkan uji statistik t yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Daerah ini berpengaruh tidak signifikan terhadap ketahanan fiskal karena nilai Prob. (0,4752) > nilai signifikansi ($\alpha = 0,05$). Variabel Belanja Daerah ini mempengaruhi signifikan positif terhadap ketahanan fiskal karena nilai Prob. (0,000) < nilai Signifikansi ($\alpha = 0,05$). Variabel Surplus/Defisit Laporan Keuangan ini mempengaruhi signifikan positif terhadap ketahanan fiskal karena nilai Prob. (0,0252) < nilai signifikansi ($\alpha = 0,05$). Dan yang terakhir untuk uji F nilai Prob (F Statistic) menunjukkan angka 0,000, maka dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel bebas mempengaruhi secara simultan terhadap ketahanan fiskal.

DAFTAR PUSTAKA

- Assidiqi, B. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Kabupaten Klaten Tahun 2008-2012. *Jurnal Profita*, 5(c), 1–11.
- Basorudin, M. (2019). Analisis Kesenambungan Fiskal Indonesia Pasca Krisis Ekonomi. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 17(2), 59–70.
- Basri, R. (2013). Analisis Penyusunan Anggaran Dan Laporan Realisasi Anggaran Pada BPM-PD Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, Vol. 1 No. 4 (Desember 2013), 202–212.

- Chodariyanti, L. (2015). Analisis Kebutuhan Fiskal Dan Kapasitas Fiskal Kabupaten Lamongan Tahun 2009-2013. *Jurnal Ekbis*, 14(2), 13. <https://doi.org/10.30736/ekbis.v14i2.120>
- Effendi, Syahril dan Tukino. 2020 Akuntansi berbasis Akurual Pada Entitas Pemerintah Daerah. Batam:Batam Publisher
- Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi 3. Jakarta:Salemba Empat
- Hariyanto, E. (2019). Tantangan Ketahanan Fiskal yang Berkelanjutan.
- Hasan, P. F. (2016). DESENTRALISASI FISKAL DAN TINGKAT KEMANDIRIAN DAERAH (Studi Pada Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Barat). *JurnalWacana Kinerja*, 17(November), 218–240.
- Indonesia, R. (2010). *Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010*. 1–413. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Imam, Ghozali. 2020. Analisis Multivariat dan Ekonometrika. Edisi 2. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ivantia S. Mokoginta (2014). *PENGELOLAAN DEFISIT ANGGARAN SEBAGAI UPAYA MENCAPAI KETAHANAN FISKAL DI INDONESIA*. 1–23.
- Kementerian Keuangan. (2019). *Analisis Keberlanjutan Fiskal Jangka Panjang*. [https://fiskal.kemenkeu.go.id/data/document/2020/lfts/LTFS- Updated.pdf](https://fiskal.kemenkeu.go.id/data/document/2020/lfts/LTFS-Updated.pdf)
- Linting, M. (2019). *ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA KANTOR PEMERINTAH KOTAMAKASSAR*. 5(003), 134–145.
- Maulana, R. (2004). *Analisis Ketahanan Fiskal Daerah Indonesia*.
- Neva, S., & Amyar, F. (2021). Pengaruh Fraud Diamond dan Gonettheory Terhadap Academic Fraud. *JAS-PT (Jurnal Analisis Sistem Pendidikan Tinggi Indonesia)*, 5(1), 41. <https://doi.org/10.36339/jaspt.v5i1.408>
- Piramita, S., Hannan, S., & Purba, J. H. V. (2021). Pengaruh Social Media Marketing Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Pembelian Kpr Non Subsidi Dengan Mediasi Persepsi Merek (Studi Pada Bank Xyz). *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen*, 7(2), 487–497. <https://doi.org/10.17358/jabm.7.2.487>
- Purba, J. H. V., Fathiah, R., & Steven, S. (2021). The Impact of the COVID-19 Pandemic on the Tourism Sector. *Riset : Jurnal Aplikasi Ekonomi, Akuntansi Dan Bisnis*, 3(1), 389–401. <https://doi.org/10.55980/esber.v1i3.50>
- Puspitasari, R., & Astrini, D. (2021). Dampak Literasi Dan Inkuisi Keuangan Terhadap Kinerja Pelaku UMKM Di Kota Bogor. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 9(2), 181–190. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v9i2.771>
- Novianta, E. N. (2018). Digital Digital Repository Repository Universitas Universitas Jember. In *Monopoli Dan Persainganm Usaha Tidak Sehat Pada Perdagangan Produk Air Minum Dalam Kemasan* (Vol. 1, Issue 3).
- Nurlaela, C., Hidayati, N., & Mahsuni, A. W. (2018). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Luas Wilayah, Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *E-Jra*, 07(10), 119–131.
- Pemendagri. (2011). Pemendagri Nu 21 Tahun 2011. *PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH*, 11(2), 10–14. <https://doi.org/10.16194/j.cnki.31-1059/g4.2011.07.016>
- Pemendagri. (2017). Pemendagri No 64 Tahun 2013. *PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH*, 53(9), 1689–1699.
- Pkem-pkapbn, T., & Fiskal, B. K. (2019). *Strategi Menjaga Kestinambungan Fiskal Jangka Panjang*. 1–53.
- Simarmata1, D. A. (2011). Fiscal Sustainability in Indonesia. *Economic Policy*, 2116, 0–33.
- Sriyana, J. (2005). *Ketahanan Fiskal: Studi Kasus Malaysia dan Indonesia*. 123–132.

- Sriyana, J. (2011). Kesenjangan antara Kebutuhan dan Kapasitas Transfer Fiskal di Indonesia. *Kontribusi Pendidikan Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi Dalam Penguatan Perekonomian Bangsa*, 1, 71–98.
- Sugeha, F. F., & Pusung, H. K. R. J. (2013). *Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2011-2013*. 84(december), 487–492. <http://ir.obihiro.ac.jp/dspace/handle/10322/3933>
- Suriadi, L. O. (2013). Pembiayaan Defisit dengan Utang dan Ketahanan Fiskal di Indonesia. *The Winners*, 14(2), 127.
- Suwandi. 2015. Desentralisasi Fiskal dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Penyerapan Tenaga Kerja, Kemiskinan, dan Kesejahteraan di Kabupaten/Kota Induk Provinsi Papua. Yogyakarta:Deepublish
- Tahwin, M. (2008). *Peranan pajak dan*. 9(1), 1–7.
- Thalib, F. (2019). Pengaruh Pad, Dana Perimbangan, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Di Jawa Timur Periode 2013-2017. *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya 2019*.
- Wahyuningsih, M. N. (2018). Analisis Kestinambungan Fiskal Pada Variabel Makro Ekonomi Indonesia Periode 1998-2017. *Ekonomi*, 1127–1136.
- Wahyuningtyas, A. E., & Arianti, F. (2010). *Analisis pengaruh pengeluaran pemerintah dan defisit anggaran terhadap investasi di indonesia (1986- 2008)*.